

## GAYA KEPEMIMPINAN DAN EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAERAH: STUDI KOMPARATIF DEDI MULYADI DAN TRI RISMAHARINI

Nindia Nur Malekha<sup>1</sup>, Eka Yulyana<sup>2</sup>

<sup>1 2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang

[2210631180028@student.unsika.ac.id](mailto:2210631180028@student.unsika.ac.id)

### Abstract

*Regional leadership plays a crucial role in determining the direction of development and the well-being of society, with each leader implementing different strategies to achieve these goals. Dedi Mulyadi adopts a populist leadership style, emphasizing direct interaction with the people and a culture-based approach, while Tri Rismaharini prioritizes managerial leadership, focusing on bureaucratic efficiency and regulation-driven infrastructure development. Policies implemented by Dedi Mulyadi, such as the eviction of riverside settlements and culture-based economic empowerment, have had positive impacts on urban governance but have also drawn criticism for perceived lack of consideration for social aspects affecting displaced residents. Meanwhile, Tri Rismaharini's policies, including urban revitalization, the "Economic Heroes" program, and the closure of Gang Dolly's red-light district, have contributed to urban transformation but faced challenges in relocation efforts and the sustainability of their impacts. Although many studies have discussed the success of both leaders' programs, there is limited research examining their long-term effectiveness and the contribution of their policies to adaptive regional governance. Additionally, there has been little analysis comparing how these two leadership models can be more optimally applied in the context of regional governance in Indonesia. Therefore, this study aims to fill these gaps by exploring how populist and managerial leadership strategies can contribute to more sustainable regional governance capable of addressing future social and bureaucratic challenges.*

**Keywords:** Public Policy, Regional Leadership, Managerial, Governance, Populist,

### Abstrak

*Kepemimpinan daerah memainkan peran penting dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dengan setiap pemimpin menerapkan strategi yang berbeda untuk mencapai tujuan tersebut. Dedi Mulyadi menerapkan kepemimpinan populis, yang menitikberatkan interaksi langsung dengan rakyat serta pendekatan berbasis budaya, sementara Tri Rismaharini mengedepankan kepemimpinan manajerial, yang berfokus pada efisiensi birokrasi serta pembangunan infrastruktur berbasis regulasi. Kebijakan yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi, seperti pengusuran pemukiman bantaran sungai dan pemberdayaan ekonomi berbasis budaya, memiliki dampak positif bagi tata kelola kota namun juga menuai kritik karena dinilai kurang memperhatikan aspek sosial warga terdampak. Sementara itu, kebijakan Tri Rismaharini, seperti revitalisasi kota, program Pahlawan Ekonomi, dan penutupan lokalisasi Gang Dolly, berkontribusi terhadap transformasi perkotaan tetapi menghadapi tantangan dalam relokasi serta keberlanjutan dampaknya. Meskipun banyak penelitian telah membahas keberhasilan program kedua pemimpin, masih terbatas studi yang mengkaji efektivitas jangka panjang serta kontribusi kebijakan mereka terhadap pemerintahan daerah yang adaptif. Selain itu, belum banyak analisis yang membandingkan bagaimana kedua model kepemimpinan ini dapat diterapkan secara lebih optimal dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana strategi kepemimpinan berbasis populisme dan manajerial dapat berkontribusi terhadap pemerintahan daerah yang lebih*

*berkelanjutan serta mampu menghadapi tantangan sosial dan birokrasi di masa depan.*

**Kata kunci:** Kebijakan publik, Kepemimpinan daerah, Manajerial, Pemerintahan, Populis.

## **A. Pendahuluan**

Kepemimpinan dalam pemerintahan daerah memiliki dampak besar terhadap arah pembangunan, kesejahteraan sosial, serta efektivitas administrasi publik. Seorang pemimpin tidak hanya harus memahami permasalahan masyarakat, tetapi juga mampu merancang strategi dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Indonesia, sebagai negara yang menerapkan sistem desentralisasi, memberi kesempatan kepada kepala daerah untuk mengembangkan gaya kepemimpinannya sendiri guna menyesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah masing-masing. Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini muncul sebagai dua figur yang memiliki pendekatan berbeda dalam memimpin daerah mereka.

Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat dan mantan Bupati Purwakarta, dikenal dengan pendekatan populis yang menonjolkan identitas budaya daerah serta interaksi langsung dengan masyarakat. Ia sering mengadvokasi nilai-nilai tradisional Sunda dalam kebijakannya dan aktif berkomunikasi dengan warga melalui media sosial. Kepemimpinannya dianggap mencerminkan pemimpin yang dekat dan peduli terhadap kebutuhan rakyat, dengan kebijakan yang mengutamakan kearifan lokal serta pemberdayaan masyarakat desa. Di sisi lain, Tri Rismaharini, yang lebih dikenal sebagai Bu Risma, adalah sosok pemimpin perempuan yang menonjol di Indonesia, terutama setelah sukses memimpin Surabaya sebagai Wali Kota dan kemudian diangkat menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia. Ia dikenal luas sebagai figur yang disiplin, tegas, dan memiliki komitmen kuat terhadap pelayanan publik, penataan kota, serta penanggulangan masalah sosial. Selama menjabat Wali Kota Surabaya, Risma berhasil mentransformasi wajah kota melalui pembangunan taman kota, penataan infrastruktur, serta inovasi layanan publik berbasis teknologi. Ketika menjadi Menteri Sosial, ia tetap mempertahankan gaya kepemimpinan yang responsif dan sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, terutama di masa-masa krisis seperti bencana alam atau pandemi.

Meskipun kedua pemimpin ini memiliki gaya yang berbeda, mereka sama-sama menunjukkan dedikasi tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dalam pendekatan kepemimpinan ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam hal bagaimana kebijakan yang mereka terapkan mampu memberikan dampak langsung terhadap rakyat. Selain itu, latar belakang sosial dan politik kedua pemimpin ini juga berpengaruh terhadap pola kepemimpinan

mereka. Dedi Mulyadi yang berasal dari daerah dengan tradisi yang kuat memilih pendekatan budaya sebagai salah satu alat untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Sementara Tri Rismaharini yang berasal dari lingkungan perkotaan yang lebih kompleks memilih pendekatan yang lebih struktural dan sistematis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kota.

Berdasarkan dinamika kepemimpinan daerah yang ditunjukkan oleh figur seperti Tri Rismaharini dan Dedi Mulyadi, rumusan masalah dalam studi ini adalah: bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan populis dan manajerial memengaruhi implementasi kebijakan publik di tingkat lokal? Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik utama dari kedua pendekatan kepemimpinan tersebut, serta menilai dampaknya terhadap keberhasilan program pemerintah daerah dalam jangka pendek maupun jangka panjang

Teori kepemimpinan daerah dalam studi ini mengacu pada kerangka kerja yang menekankan dimensi gaya komunikasi, orientasi kebijakan, dan pendekatan terhadap birokrasi. Kepemimpinan populis seringkali dikaitkan dengan pencitraan, penguatan hubungan langsung dengan masyarakat, serta pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik. Sementara itu, kepemimpinan manajerial menitikberatkan pada efisiensi, akuntabilitas, dan kolaborasi dengan struktur pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan ini, studi berupaya mengintegrasikan teori Weber mengenai birokrasi rasional dengan model kepemimpinan transformasional yang relevan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Dalam konteks pembangunan, Dedi Mulyadi lebih menekankan aspek sosial dan pemberdayaan ekonomi lokal, sedangkan Tri Rismaharini lebih fokus pada pembangunan fisik dan peningkatan kualitas infrastruktur kota. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik daerah yang dipimpin juga memengaruhi kebijakan yang diambil oleh kepala daerah. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada gaya yang diterapkan, tetapi juga kemampuan dalam menghadapi tantangan dan dinamika yang terjadi dalam pemerintahan. Dedi Mulyadi menghadapi tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara aspek budaya dan modernisasi, sementara Tri Rismaharini harus mengelola tekanan politik serta tuntutan masyarakat urban yang terus berkembang.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting yang dapat berkontribusi bagi berbagai pihak, baik akademisi, pemimpin daerah, maupun masyarakat luas. Studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana gaya kepemimpinan yang berbeda dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan daerah. Dengan mempelajari dua

pemimpin yang memiliki pendekatan berbeda, pembaca dapat melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing strategi dalam mengelola pemerintahan. Artikel ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kepala daerah atau calon pemimpin yang ingin mengembangkan strategi kepemimpinan yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Dengan memahami bagaimana Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini menerapkan kebijakan dan mengatasi tantangan, calon pemimpin dapat mengadaptasi pendekatan yang paling relevan untuk daerah mereka.

Dalam dunia akademik, penelitian mengenai kepemimpinan daerah masih terus berkembang. Studi ini bisa menjadi referensi dalam kajian tentang kepemimpinan transformasional dan populis, serta bagaimana pendekatan tersebut berdampak pada masyarakat dan efektivitas pemerintahan. Dengan memahami kebijakan yang diterapkan oleh kedua pemimpin ini, pembuat kebijakan dapat mengevaluasi strategi yang paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Studi ini dapat menjadi bahan analisis bagi pemerintah dalam menilai kebijakan yang harus diterapkan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi wilayah masing-masing. Selain itu, artikel ini tidak hanya bermanfaat bagi akademisi dan pemimpin daerah, tetapi juga bagi masyarakat umum. Dengan memahami bagaimana seorang pemimpin bekerja, masyarakat dapat lebih aktif dalam partisipasi politik serta berkontribusi dalam pembangunan daerahnya. Pemahaman tentang kepemimpinan yang baik juga dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin di masa depan.

Setelah memahami manfaat dari studi ini, maka penting untuk melihat bagaimana analisis ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang kepemimpinan daerah. Studi ini menjadi penting untuk memahami bagaimana gaya kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan dampak yang beragam terhadap masyarakat dan pemerintahan daerah. Dengan mengkaji berbagai aspek kepemimpinan kedua tokoh ini, kita dapat mengetahui kekuatan serta kelemahan dari masing-masing pendekatan yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan. Komparasi ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana seorang pemimpin daerah dapat menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik wilayahnya. Tidak ada satu model kepemimpinan yang mutlak lebih baik dari yang lain, tetapi keberhasilan seorang kepala daerah sangat bergantung pada bagaimana ia mampu memahami dan merespons kebutuhan masyarakatnya.

Dalam perspektif akademik, studi ini dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai kepemimpinan di tingkat pemerintahan daerah. Dengan menganalisis strategi dan

kebijakan yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini, kita dapat melihat bagaimana pendekatan kepemimpinan tertentu dapat menciptakan hasil yang efektif dan berkelanjutan. Studi ini juga relevan bagi para pemangku kebijakan yang ingin mengembangkan strategi kepemimpinan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Pemahaman tentang bagaimana kepemimpinan dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan dapat menjadi pedoman bagi calon pemimpin daerah di masa depan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif, yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam bagaimana kedua pemimpin menerapkan kebijakan serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur, yakni penelusuran berbagai sumber akademik, laporan pemerintahan, serta berita dari media massa yang membahas kebijakan dan kepemimpinan kedua tokoh.

Studi literatur digunakan untuk menelaah berbagai teori dan konsep yang relevan dengan kepemimpinan daerah, termasuk teori kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan populis. Selain itu, kajian ini juga mencakup analisis terhadap publikasi akademik, laporan kebijakan pemerintah, serta artikel jurnal yang membahas dampak kebijakan yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini. Sumber-sumber dari media massa turut digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan mereka diterima oleh masyarakat serta bagaimana media membentuk narasi kepemimpinan mereka dalam pemerintahan daerah. Dengan analisis mendalam terhadap berbagai literatur ini, penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kepemimpinan mereka.

Data yang diperoleh melalui studi literatur kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-komparatif, yang memungkinkan perbandingan berdasarkan variabel seperti pendekatan kepemimpinan, kebijakan yang diterapkan, serta respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Informasi yang terkumpul dikategorikan berdasarkan temanya, seperti pembangunan infrastruktur, kebijakan sosial, serta aspek komunikasi politik masing-masing pemimpin. Dengan metode ini, penelitian dapat menunjukkan pola kepemimpinan yang diterapkan dan bagaimana strategi masing-masing tokoh berkontribusi terhadap pemerintahan daerah.

Untuk memastikan validitas hasil penelitian, dilakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber literatur yang digunakan. Setiap dokumen dan artikel akademik dikaji berdasarkan kredibilitasnya, dengan mempertimbangkan relevansi serta objektivitas dalam penyajian data. Penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai publikasi dan literatur dari perspektif yang berbeda guna mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kepemimpinan kedua tokoh. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kesimpulan yang lebih objektif dan dapat dijadikan rujukan dalam studi kepemimpinan daerah.

### **C. Pembahasan dan Temuan**

#### **1. Kepemimpinan Populis vs. Kepemimpinan Manajerial**

Kepemimpinan dalam pemerintahan daerah memainkan peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan efektivitas administrasi publik. Menurut Bass (1985), kepemimpinan transformasional memiliki potensi besar dalam menciptakan perubahan struktural dan meningkatkan efektivitas organisasi. Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini menunjukkan pendekatan yang berbeda, di mana Dedi Mulyadi lebih dikenal dengan gaya populis sementara Tri Rismaharini lebih menonjol dengan pendekatan manajerial. Perbedaan ini terlihat dalam bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat, mengambil keputusan kebijakan, serta mengelola struktur pemerintahan.

Dedi Mulyadi menerapkan kepemimpinan populis, yang menurut Laclau (2005) berfokus pada bagaimana pemimpin populis membangun hubungan emosional dengan masyarakat melalui simbol dan narasi. Ia lebih sering turun langsung ke masyarakat dan menggunakan simbol-simbol budaya lokal dalam menyampaikan kebijakan dan visi kepemimpinannya. Dengan pendekatan ini, ia berupaya menciptakan kedekatan dengan rakyatnya, sehingga kebijakan yang diambil terkesan berasal langsung dari aspirasi masyarakat.

Sebaliknya, Tri Rismaharini lebih mengedepankan kepemimpinan manajerial, yang mengutamakan efisiensi sistem pemerintahan dan tata kelola yang modern. Menurut Masduki Asbari (2024), pemimpin yang berfokus pada tata kelola sistematis memiliki peluang lebih besar untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Hal ini terlihat dalam kebijakan yang ia terapkan di Surabaya, seperti reformasi birokrasi, peningkatan layanan publik berbasis teknologi, serta optimalisasi ruang kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil oleh kedua pemimpin

memperlihatkan perbedaan dalam hal kesinambungan dan institusionalisasi kebijakan. Dalam gaya populis, keberlanjutan kebijakan sangat bergantung pada figur pemimpin dan dukungan masyarakat, sehingga transisi pemerintahan sering kali menjadi titik kritis bagi kelangsungan program. Sebaliknya, gaya manajerial seperti yang diterapkan Risma menunjukkan kecenderungan institusional yang lebih kuat, karena kebijakan terintegrasi dalam struktur birokrasi dan memiliki indikator pengawasan kinerja yang konsisten. Ke depan, tantangan utama adalah bagaimana kedua pendekatan ini dapat dirancang agar saling melengkapi dan memperkuat daya tahan kebijakan terhadap perubahan politik, birokrasi, dan kebutuhan masyarakat.

Teori kepemimpinan populis yang dikemukakan oleh Laclau (2005) menyatakan bahwa pemimpin populis membangun hubungan erat dengan masyarakat melalui simbol, narasi, dan keterlibatan langsung. Gaya kepemimpinan ini cenderung lebih efektif dalam kondisi sosial di mana masyarakat memiliki keterikatan kuat dengan nilai-nilai tradisional. Hal ini dapat dilihat dalam cara Dedi Mulyadi mengintegrasikan budaya Sunda dalam kebijakan pemerintahannya dan berusaha menjaga identitas sosial masyarakatnya sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Di sisi lain, teori kepemimpinan transformasional Bass (1985) menekankan bahwa pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu menciptakan perubahan struktural dan meningkatkan efektivitas organisasi melalui visi jangka panjang. Hal ini lebih mencerminkan gaya kepemimpinan Tri Rismaharini, yang selalu berorientasi pada peningkatan sistem pemerintahan dan pengembangan tata kota modern. Ia tidak hanya berupaya memperbaiki kondisi sosial masyarakat, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih efisien untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

**Table 1.** Komparasi Gaya Kepemimpinan Populis dan Kepemimpinan Manajerial

| No | Aspek                   | Kepemimpinan Populis                                  | Kepemimpinan Manajerial                         |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Pendekatan Kepemimpinan | Interaksi langsung, membangun kedekatan emosional     | Berbasis sistem, struktur, dan regulasi         |
| 2  | Fokus Utama             | Aspirasi rakyat, kebutuhan masyarakat secara langsung | Efisiensi organisasi, pencapaian target kinerja |
| 3  | Komunikasi              | Narasi sederhana, simbolis, mudah diterima publik     | Formal, berbasis data, laporan dan evaluasi     |
| 4  | Pengambilan Keputusan   | Responsif terhadap suara masyarakat, fleksibel        | Berdasarkan analisis, prosedur, dan perencanaan |

|   |                        |                                                      |                                                   |
|---|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5 | Hubungan dengan Publik | Dekat, partisipatif, membangun kepercayaan langsung  | Profesional, menjaga jarak untuk objektivitas     |
| 6 | Implementasi Kebijakan | Cepat, kadang situasional, menyesuaikan aspirasi     | Sistematis, terstruktur, berorientasi hasil       |
| 7 | Kelebihan              | Meningkatkan partisipasi publik, membangun loyalitas | Efisiensi tinggi, keberlanjutan program           |
| 8 | Kekurangan             | Rentan populisme semu, kebijakan kurang terstruktur  | Kurang fleksibel, bisa dianggap kurang humanis    |
| 9 | Contoh Konteks Ideal   | Masyarakat tradisional, isu sosial yang sensitif     | Organisasi besar, pemerintahan modern/teknokratis |

**Source:** Hasil olahan penulis berdasarkan Laclau (2005), Bass (1985).

Perbedaan dalam kepemimpinan ini mencerminkan bagaimana latar belakang sosial dan ekonomi suatu wilayah dapat memengaruhi strategi pemerintahan daerah. Dedi Mulyadi, yang memimpin di wilayah dengan keterikatan kuat terhadap budaya lokal, lebih memilih pendekatan berbasis komunitas dan interaksi sosial. Sementara itu, Tri Rismaharini, yang mengelola kota besar dengan tantangan urbanisasi dan industrialisasi, lebih mengedepankan kebijakan berbasis data dan teknologi.

Meskipun kedua gaya kepemimpinan memiliki keunggulan masing-masing, keduanya juga memiliki tantangan. Kepemimpinan populis dapat menghadapi kesulitan dalam membangun sistem pemerintahan yang terstruktur dan efisien, sedangkan kepemimpinan manajerial bisa menghadapi tantangan dalam membangun hubungan yang erat dengan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas kepemimpinan bergantung pada bagaimana seorang pemimpin mampu menyeimbangkan antara kedekatan dengan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan mempertimbangkan dinamika pemerintahan daerah, studi ini menjadi penting dalam memahami bagaimana pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi sosial dan ekonomi di wilayahnya. Melalui analisis komparatif ini, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan serta bagaimana strategi mereka memengaruhi efektivitas pemerintahan daerah.

## 2. Kebijakan dalam Transformasi Sosial dan Pembangunan

**Table 2.** Dampak Kebijakan Dedi Mulyadi terhadap Masyarakat dan Pemerintahan Daerah

| No | Kebijakan | Dampak Positif | Dampak Negatif |
|----|-----------|----------------|----------------|
|----|-----------|----------------|----------------|

|   |                                           |                                                        |                                                                |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Pembongkaran tempat wisata ilegal         | Mengurangi kerusakan lingkungan, mencegah banjir       | Menimbulkan resistensi dari sektor pariwisata                  |
| 2 | Pengusuran pemukiman bantaran sungai      | Mengurangi risiko banjir, perbaikan tata ruang kota    | Warga terdampak kehilangan tempat tinggal akibat relokasi      |
| 3 | Program barak militer untuk anak nakal    | Pembinaan disiplin anak, mengurangi kenakalan remaja   | Dinilai terlalu keras, kurang mempertimbangkan aspek psikologi |
| 4 | Pemberdayaan ekonomi berbasis budaya      | Penguatan identitas budaya, ekonomi lokal berkembang   | Kurangnya investasi dalam infrastruktur kota modern            |
| 5 | Revitalisasi ruang sosial berbasis budaya | Memperkuat tradisi lokal, meningkatkan hubungan sosial | Tidak semua masyarakat merasakan manfaat langsung              |

**Source:** Tribun Jabar. "Daftar 8 Gebrakan Dedi Mulyadi, Kebijakannya Ada yang Sampai Tuai Kritik dari Ormas hingga Menteri."

**Table 3.** Dampak Kebijakan Tri Rismaharini terhadap Masyarakat dan Pemerintahan Daerah

|   | Kebijakan                                | Dampak Positif                                               | Dampak Negatif                                                  |
|---|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Revitalisasi Sungai dan Tata Ruang Kota  | Mengurangi risiko banjir, memperbaiki ekosistem sungai       | Kritik terhadap relokasi warga yang kurang matang               |
| 2 | Program Pahlawan Ekonomi                 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM           | Tantangan dalam keberlanjutan program                           |
| 3 | Pembangunan infrastruktur dan pedestrian | Peningkatan fasilitas publik dan mobilitas warga             | Biaya tinggi, perlu pemeliharaan jangka panjang                 |
| 4 | Penutupan Lokalisasi Gang Dolly          | Mengurangi praktik prostitusi, meningkatkan moralitas sosial | Kritik terhadap kurangnya solusi ekonomi bagi pekerja terdampak |
| 5 | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau          | Menambah taman kota dan hutan kota, meningkatkan ekologi     | Pemeliharaan berkelanjutan diperlukan, anggaran besar           |

**Source:** CNN Indonesia. "10 Tahun Pimpin Surabaya, Ini Warisan Risma

Kebijakan dalam pemerintahan daerah memainkan peran penting dalam mengubah kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur suatu wilayah. Menurut Maria Aprilia & Kismartini (2016), kebijakan publik dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu bottom-up, yang lebih melibatkan partisipasi masyarakat, dan top-down, yang berorientasi pada regulasi dari pemerintah. Perbedaan strategi ini mencerminkan bagaimana latar belakang sosial dan

kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing membentuk kebijakan yang diterapkan oleh kedua pemimpin.

Dedi Mulyadi percaya bahwa kearifan lokal dan identitas budaya harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah. Menurut DPR (2020), kebijakan berbasis budaya dapat membantu memperkuat identitas sosial masyarakat dan memastikan bahwa modernisasi tidak menghilangkan akar budaya yang telah lama berkembang. Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, ia banyak menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pelestarian budaya Sunda, seperti penggunaan pakaian adat bagi pegawai negeri, pembangunan ruang publik berbasis seni dan budaya, serta integrasi nilai-nilai tradisional dalam pendidikan formal.

Sedangkan, Tri Rismaharini berfokus pada pembangunan infrastruktur dan tata kota sebagai fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, Surabaya mengalami transformasi besar dalam aspek transportasi publik, sistem drainase, serta pengelolaan sampah. Salah satu kebijakan yang paling berpengaruh adalah revitalisasi taman kota, yang menurut Masduki Asbari (2024) merupakan bagian dari pendekatan tata kota modern yang mengutamakan keteraturan dan efisiensi dalam pembangunan.

Dalam konteks teori pembangunan daerah, kebijakan Dedi Mulyadi lebih dekat dengan pendekatan pembangunan berbasis komunitas, di mana masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan. Model ini dikenal sebagai pendekatan bottom-up, yang memberikan ruang bagi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Sementara itu, kebijakan Tri Rismaharini lebih mencerminkan pendekatan top-down, di mana pemerintah menetapkan regulasi dan melakukan pembangunan secara sistematis berdasarkan analisis data dan perencanaan jangka panjang.

Pendekatan berbasis komunitas yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi memiliki keunggulan dalam menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat di antara warga, karena masyarakat merasa bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, tantangan utama dari pendekatan ini adalah ketergantungan yang tinggi pada partisipasi masyarakat, yang sering kali tidak stabil dan sulit diukur efektivitasnya dalam jangka panjang. Di sisi lain, pendekatan top-down yang dilakukan oleh Tri Rismaharini memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan kontrol terhadap hasil kebijakan, tetapi sering kali menghadapi tantangan dalam membangun hubungan emosional dengan masyarakat.

Salah satu kebijakan Dedi Mulyadi yang memiliki dampak besar adalah penguatan

ekonomi lokal melalui program pemberdayaan komunitas berbasis budaya. Ia menerapkan berbagai program yang mendukung sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro berbasis kearifan lokal, sehingga masyarakat dapat tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, Tri Rismaharini berhasil mengubah Surabaya menjadi pusat ekonomi perkotaan dengan mengembangkan sistem pendukung bagi UMKM serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor industri dan jasa.

Perbedaan dalam kebijakan ini menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan harus disesuaikan dengan karakteristik daerah yang dipimpin. Dedi Mulyadi, dengan basis wilayah yang lebih tradisional, menggunakan pendekatan berbasis budaya untuk membangun kesadaran sosial dan ekonomi. Sementara Tri Rismaharini, yang mengelola kota dengan tingkat urbanisasi tinggi, memilih kebijakan berbasis tata kota modern dan efisiensi sistem pemerintahan. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan masing-masing dan dapat dijadikan referensi bagi pemimpin daerah di Indonesia untuk menyesuaikan strategi kepemimpinan mereka dengan tantangan yang ada.

Studi ini memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan kebijakan dalam transformasi sosial dan pembangunan dapat berdampak pada efektivitas pemerintahan daerah. Tidak ada satu model kebijakan yang mutlak lebih baik daripada yang lain. Keberhasilan suatu pemerintahan bergantung pada bagaimana pemimpin mampu mengelola sumber daya yang ada dan menyesuaikan strategi mereka dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dalam merumuskan konsep kepemimpinan daerah yang lebih adaptif dan inovatif untuk masa depan.

### 3. Kontroversi dan Tantangan dalam Kebijakan Pemerintahan

Kebijakan yang diterapkan oleh seorang pemimpin daerah tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Menurut Clarisa Mutia Huda (2024), tantangan dalam implementasi kebijakan sering kali muncul dari kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini menghadapi berbagai kritik dalam kebijakan mereka, meskipun keduanya memiliki visi untuk membangun daerah yang lebih baik.

Dedi Mulyadi dikenal sebagai pemimpin yang berorientasi pada pembangunan berbasis budaya dan kedekatan dengan rakyat. Namun, beberapa kebijakan yang ia terapkan menimbulkan perdebatan, terutama dalam hal penggusuran pemukiman di bantaran sungai. Menurut Hersey & Blanchard (1980), pemimpin harus mampu mengelola resistensi masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dengan mencari solusi yang dapat mengurangi dampak

negatifnya. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko banjir serta meningkatkan kualitas tata ruang daerah, tetapi banyak warga yang terdampak kehilangan tempat tinggal tanpa solusi yang memadai.

Selain itu, kebijakan Dedi Mulyadi yang mengirim anak-anak nakal ke barak militer juga menuai pro dan kontra. Program ini dimaksudkan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan anak-anak yang sering terlibat kenakalan atau tawuran. Ia meyakini bahwa pendidikan berbasis disiplin militer dapat mengubah perilaku negatif mereka dan membantu membentuk sikap yang lebih bertanggung jawab. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa pendekatan ini terlalu keras dan tidak mempertimbangkan aspek psikologis anak-anak yang masuk dalam program tersebut.

Di sisi lain, Tri Rismaharini juga menghadapi kontroversi dalam beberapa kebijakan yang ia terapkan di Surabaya. Salah satu kebijakan yang paling mendapat sorotan adalah penutupan lokalisasi Gang Dolly. Risma berupaya menghapus praktik prostitusi di Surabaya demi meningkatkan moralitas sosial dan keamanan kota. Meskipun tujuan dari kebijakan ini baik, banyak pekerja seks komersial yang kehilangan sumber mata pencaharian tanpa ada solusi ekonomi yang jelas. Kritik utama terhadap kebijakan ini adalah kurangnya program transisi yang memastikan mereka memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak setelah lokalisasi ditutup.

Selain penutupan Gang Dolly, Tri Rismaharini juga menghadapi tantangan dalam reformasi birokrasi yang ia terapkan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat disiplin dan memiliki ekspektasi tinggi terhadap pegawai pemerintahan. Hal ini menyebabkan gesekan di dalam birokrasi, karena beberapa pegawai negeri merasa bahwa gaya kepemimpinannya terlalu otoritatif. Kedisiplinan yang ia terapkan membawa hasil yang positif dalam peningkatan layanan publik, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam membangun hubungan yang lebih fleksibel dengan para pemangku kepentingan di pemerintahan daerah.

Dari perspektif teori kebijakan publik, tantangan dalam implementasi kebijakan dapat muncul dari kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Dalam kasus Dedi Mulyadi, kebijakan pengusutan dan program barak militer untuk anak-anak bermasalah menghadapi kritik karena kurangnya pendekatan berbasis kesejahteraan sosial. Sementara itu, dalam kasus Tri Rismaharini, tantangan muncul dari kebijakan yang menuntut perubahan sosial secara cepat tanpa memberikan alternatif yang memadai bagi kelompok masyarakat yang terdampak.

Kebijakan yang kontroversial sering kali menunjukkan bahwa tidak ada solusi yang sempurna dalam pemerintahan daerah. Setiap keputusan memiliki konsekuensi yang dapat menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada bagaimana seorang pemimpin dapat menangani resistensi masyarakat, memberikan solusi bagi kelompok terdampak, dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan memiliki manfaat jangka panjang.

Studi ini memberikan gambaran tentang bagaimana seorang pemimpin harus memperhitungkan berbagai aspek sebelum menerapkan kebijakan besar di daerahnya. Kebijakan yang membawa perubahan struktural memang sering menghadapi tantangan, tetapi dengan perencanaan yang matang dan komunikasi yang baik, pemerintah daerah dapat meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini dapat menjadi referensi bagi pemimpin masa depan dalam merancang kebijakan yang lebih strategis dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Implikasi bagi Kepemimpinan Daerah di Indonesia

Kepemimpinan daerah memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Masduki Asbari (2024), pemimpin daerah harus memiliki visi yang jelas dalam menciptakan perubahan serta strategi yang adaptif terhadap tantangan yang dihadapi. Melalui studi komparatif antara Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini, kita dapat memahami bagaimana pendekatan yang berbeda dalam kepemimpinan memengaruhi efektivitas pemerintahan daerah.

Selain itu, Tri Rismaharini menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis sistem dan regulasi dapat menciptakan perubahan struktural yang lebih luas. Dengan fokus pada reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur, ia berhasil meningkatkan efisiensi pemerintahan serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata. Pendekatan ini lebih sesuai bagi daerah yang membutuhkan perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, khususnya kota-kota besar dengan tantangan urbanisasi dan industrialisasi yang kompleks. Model kepemimpinan ini membuktikan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada komunikasi dengan masyarakat, tetapi juga pada kebijakan berbasis data dan sistem administrasi yang kuat.

Dari perspektif teori kepemimpinan situasional, seperti yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard (1977), pemimpin yang efektif harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kondisi sosial dan ekonomi di daerah yang mereka pimpin. Dedi Mulyadi lebih cocok untuk wilayah dengan karakteristik sosial yang berbasis komunitas,

sementara Tri Rismaharini lebih efektif dalam lingkungan yang membutuhkan perubahan struktural besar. Oleh karena itu, pemimpin daerah di Indonesia perlu memahami bahwa tidak ada satu pendekatan yang bisa diterapkan secara universal. Keberhasilan kepemimpinan sangat bergantung pada bagaimana mereka menyesuaikan strategi dengan kebutuhan masyarakat.

Implikasi dari studi ini juga menunjukkan bahwa kepemimpinan daerah harus mampu mengharmoniskan antara pendekatan sosial dan manajerial. Pemimpin yang terlalu berfokus pada kedekatan dengan masyarakat bisa menghadapi kesulitan dalam membangun sistem pemerintahan yang efisien, sementara pemimpin yang terlalu berorientasi pada regulasi dan birokrasi bisa mengalami tantangan dalam membangun hubungan emosional dengan masyarakat. Oleh karena itu, strategi kepemimpinan yang ideal adalah yang mampu menggabungkan pendekatan populis dengan pendekatan berbasis sistem untuk menciptakan pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa keberlanjutan kebijakan sangat bergantung pada bagaimana pemimpin mengelola transisi dalam pemerintahan. Kebijakan yang diterapkan oleh seorang pemimpin harus memiliki mekanisme yang memastikan bahwa dampak positifnya tetap berlanjut meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Salah satu kelemahan dari pendekatan populis yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi adalah bahwa kebijakan berbasis komunikasi sosial cenderung tidak memiliki sistem keberlanjutan yang kuat setelah pemimpin berganti. Sebaliknya, kebijakan yang diterapkan oleh Tri Rismaharini memiliki struktur yang lebih kokoh karena berbasis regulasi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menjaga fleksibilitas hubungan dengan masyarakat.

Implikasi terakhir dari studi ini adalah perlunya pemimpin daerah untuk memiliki strategi komunikasi yang efektif dalam setiap kebijakan. Masyarakat harus memahami tujuan dari kebijakan yang diterapkan agar dapat menerima dan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Dedi Mulyadi unggul dalam membangun komunikasi langsung dengan masyarakatnya, tetapi perlu lebih memperkuat sistem dalam pemerintahannya agar kebijakannya memiliki dampak jangka panjang. Sementara itu, Tri Rismaharini sukses dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, tetapi perlu mempertimbangkan cara yang lebih inklusif dalam menyampaikan kebijakan kepada masyarakat yang terdampak.

Dengan memahami implikasi dari kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini, studi ini dapat menjadi referensi bagi pemimpin daerah di Indonesia dalam merancang strategi pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan pemerintahan daerah tidak

hanya ditentukan oleh visi seorang pemimpin, tetapi juga oleh bagaimana mereka mampu menyesuaikan strategi kepemimpinan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan pemerintahan yang ada.

#### **D. Simpulan**

Kepemimpinan dalam pemerintahan daerah memiliki peran kunci dalam menentukan efektivitas tata kelola publik. Penelitian ini mengkaji integrasi antara gaya kepemimpinan populis dan manajerial sebagai respons terhadap tuntutan birokrasi yang adaptif dan inklusif. Gaya populis menunjukkan kekuatan dalam membangun kedekatan emosional dengan rakyat, sedangkan gaya manajerial memberikan kerangka kerja terstruktur untuk perencanaan dan pengawasan kebijakan. Kombinasi keduanya berpotensi menciptakan pola kepemimpinan yang seimbang antara empati sosial dan efisiensi administratif. Melalui studi kasus Dedi Mulyadi dan Tri Rismaharini, terlihat bahwa pendekatan populis mampu memperkuat partisipasi publik, namun berisiko mengarah pada kebijakan yang tidak sistematis jika tidak ditopang oleh mekanisme manajerial. Sebaliknya, gaya manajerial mencerminkan stabilitas birokrasi, tetapi membutuhkan sentuhan populis agar kebijakan tetap responsif terhadap dinamika sosial. Oleh karena itu, sinergi kedua pendekatan perlu dioptimalkan agar menghasilkan kepemimpinan yang adaptif, efektif, dan berkelanjutan.

Saran praktis bagi pemimpin daerah lain adalah memadukan gaya komunikasi populis dalam menjaring aspirasi masyarakat dengan pendekatan manajerial dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sistem monitoring berbasis indikator kinerja dan forum aspirasi warga berbasis digital dapat menjadi solusi praktis untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan akuntabel. Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan kepemimpinan lintas fungsi juga sangat relevan untuk menunjang strategi ini. Rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah mencakup pentingnya penyusunan indikator keberhasilan yang menggabungkan aspek kuantitatif dan kualitatif. Dalam konteks ini, Yukl (2013) menekankan bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh karakter pribadi, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan organisasi dan tantangan eksternal. Pemimpin yang mampu menyeimbangkan strategi komunikasi dan pengelolaan birokrasi akan lebih siap menghadapi tekanan politik dan sosial.

Batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup studi kasus yang terbatas pada dua figur kepemimpinan, sehingga belum menggambarkan keragaman pola kepemimpinan daerah secara menyeluruh. Selain itu, data persepsi masyarakat belum digali secara komprehensif

melalui instrumen survei atau wawancara mendalam, yang seharusnya dapat memperkuat analisis terhadap efektivitas gaya kepemimpinan. Untuk memperkaya pemahaman, penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan komparatif lintas daerah dengan karakteristik politik, sosial, dan demografis yang berbeda. Metodologi campuran (mixed-methods) dapat memberikan gambaran yang lebih utuh, sementara studi longitudinal akan memperlihatkan dampak jangka panjang gaya kepemimpinan terhadap tata kelola dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### **Daftar Pustaka**

- Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
- Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1977). *Management of organizational behavior: Utilizing human resources*. Prentice Hall.
- Laclau, E. (2005). *On populist reason*. Verso.
- Masduki, A. (2024). *Kepemimpinan transformasional dalam pemerintahan daerah*. Universitas Indonesia Press.
- Yukl, G. (2013). *Leadership in Organizations* (8th ed.). Pearson Education.

### **JURNAL ILMIAH**

- Aprilia, M., & Kismartini. (2016). Kebijakan publik deliberatif dalam pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 45–60. (<https://doi.org/10.21580/jpw.2019.1.1.2335>)
- Asbari, M. (2024). Transformasi kepemimpinan dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 22(1), 88–105. (<https://doi.org/10.58230/27454312.2213>)
- Huda, C. M. (2024). Ketidakseimbangan kebijakan pusat dan implementasi daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 78–92. (<https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2742>)
- Gunawan, G., Kadiyono, A. L., & Raspati, F. A. (2025). Structural validity and reliability of the Indonesian version of self-leadership. *Journal of Leadership in Organizations*, 7(1). (<https://doi.org/10.22146/jlo.95641>)
- Zvavahera, P. (2025). Exploring leadership models in government institutions. *Journal of Leadership in Organizations*, 7(1). (<https://doi.org/10.22146/jlo.95752>)

### **ARTIKEL DARI SURAT KABAR / BERITA**

- CNN Indonesia. "10 Tahun Pimpin Surabaya, Ini Warisan Risma."
- Tribun Jabar. "Daftar 8 Gebrakan Dedi Mulyadi, Kebijakannya Ada yang Sampai Tuai

Kritikan dari Ormas hingga Menteri."

Jatim Now. Menteri Sosial Tri Risma Harini saat menyalurkan bantuan korban tragedi Kanjuruhan. (<https://jatimnow.com/baca-50833>)

Tribun Jabar. Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, turun ke Sungai Cipalabuan pasca banjir bandang. (<https://jabar.tribunnews.com/2025/03/14>)

#### **LAPORAN PEMERINTAH / KEBIJAKAN PUBLIK**

DPR RI. (2020). Evaluasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sekretariat DPR RI.